

Apakah Dikotomi Santri-Abangan Clifford Geertz Masih Relevan? Pertarungan Basis Sosial Partai Politik dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Jombang

Salman Al Farizi

Email: salmansaf5@gmail.com

ABSTRACT

Like many other developing countries, naturally pluralistic in term of social differentiation, social structure is considered central factor in order to grasp political parties in Indonesia which follow social distinction to gain political power. However, little research has been conducted investigating specifically how or what strategy political parties use to exploit social distinction for political benefit as well as questioning whether or not categorization of major social distinction flooding by Clifford Geertz notion of santri-abangan dichotomy is still relevant . That led me to conduct a field research investigating the ratification delay of Jombang local regulation of education for more than a decade suspected to be caused by party competition in Jombang. Data primarily gathered from in-depth interview and observation as well as secondary data from government resources and were analyzed by using qualitative-descriptive approach. Results show political parties in Jombang use public policy (local regulation) to strengthen their social base. They follow social differentiation in Jombang which is divided to santri-puritan-abangan distinction. Santri party attempts to integrate traditional santri-based education pondok pesantren to local regulation of education in hope they could strengthen their santri social base for political benefit whilst in response, both abangan party and puritan party stop the attempt by delaying the local regulation. Moreover, finding presenting how sosial distinction of Jombang society divided into santri-puritan-abangan shows that Geertz has simplified santri which should actually be distinguished that there are differences between the tradisionalist santri and the modernist puritan.

Key words: political party, social structure, social base, local regulation, pondok pesantren.

PENDAHULUAN

Dalam mengkaji partai politik di Indonesia banyak sarjana yang menyerukan pentingnya memahami struktur sosial. Hal tersebut penting karena bagaimanapun pendekatan teori partai politik yang banyak berkembang sangatlah “Eropa-sentris” dan melupakan bahwa sistem politik di Indonesia yang notabene adalah negara berkembang yang berbeda dan unik. Sebagai salah satu kekuatan politik, partai politik tidak lain adalah refleksi dari konstruksi sosial masyarakatnya dimana nilai dan ideologi yang dikembangkan tidak jauh berbeda dengan nilai dan pandangan hidup masyarakatnya (Bulkin, 1995:xxiii).

Pertanyaannya, mengapa partai politik di Indonesia menjadi berbeda dengan partai politik di tempat lain? Hal tersebut disebabkan partai politik mengadakan adjusting terhadap perbedaan sosial yang ada seperti social-religious distinction (Lev, 1996:xix dalam Amal, 1996). Buktinya, dari era NU-Masyumi-PNI-PKI, Golkar-PDI-PPP, hingga sekarang PKB-PAN-PDIP, polarisasi partai politik di Indonesia selalu masuk dalam kutub partai nasionalis dan partai Islam baik konservatif maupun modernis. Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik melakukan penyesuaian diri dengan kultur dan iklim sosial masyarakat di Indonesia yang menurut Clifford Geertz terdiri dari masyarakat muslim taat (santri), muslim sekuler yang mendukung pemisahan agama dan politik (abangan) (Nakamura, 1983:69).

Adjusting partai politik di Indonesia terhadap lingkungannya penting sebab lagi-lagi banyak sarjana membuktikan hubungan erat antara kekuasaan politik dan kemampuan menyesuaikan diri dengan struktur sosial. Partai politik di *third wave democracy* seperti Indonesia memiliki konteks demokrasi yang berbeda dengan partai politik di *advanced democracy* dimana partai mempolitisasi perbedaan sosial terkotak-kotak dalam *partisan attachment* tertentu (Lupu dan Riedl, 2012:1340). Namun demikian penulis tidak sependapat bahwa polarisasi partai akan berubah seiring pergantian rezim, pergaulan demokrasi yang membaik, atau kondisi ekonomi. Rentetan sejarah membuktikan, terlepas dari rezim politik apapun, otoriter atau demokratis, dalam kondisi moneter atau tidak, partai politik di Indonesia tidak pernah menanggalkan seragam nasionalis atau agamisnya sebab hal tersebut satu-satunya cara untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat.

Dalam konteks sistem politik yang lebih kecil nampaknya proposisi tersebut juga berlaku. Di Kabupaten Jombang pertarungan politik antara gabungan kekuatan partai nasionalis (PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura, Nasdem, Gerindra) dan partai Islam modernis (PAN dan PKS) dengan kekuatan partai Islam konservatif (PKB dan PPP) telah menahan pengesahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jombang sejak awal 2000-an hingga akhir tahun 2016 yang lalu. Penyebabnya, partai nasionalis dan partai Islam modernis tidak mengizinkan pondok pesantren masuk dalam Perda sebab secara politik hal tersebut akan menguatkan basis sosial pendukung partai Islam konservatif sehingga baik partai nasionalis dan partai Islam modernis menahan pengesahan Perda di gedung dewan. Ingat bahwa, pondok pesantren adalah pendidikan khas masyarakat Islam konservatif atau tradisional yang dikenal masyarakat santri dengan pandangan keagamaan Ahlussunnah wal jamaah yang lekat dengan Nahdlatul Ulama dan dalam area politik merupakan platform PKB dan PPP yang mengupayakan masuknya pesantren dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan (Raharjo, 1985:9).

Fenomena di Jombang tersebut menunjukkan suatu kealpaan kajian para sarjana untuk menguak bagaimana tahap selanjutnya setelah partai politik melakukan adjusting dengan kondisi struktur sosial. Penulis percaya bahwa setelah menyesuaikan diri dengan struktur sosial (“menjadi” partai agamis atau nasionalis), partai politik senantiasa melakukan upaya-upaya

untuk menguatkan basis sosial pendukungnya melalui strategi tertentu utamanya melalui kebijakan publik. Partai politik memiliki resource dengan para wakilnya di pemerintahan sehingga mendorong haluan arah kebijakan yang mengarah pada penguatan basis sosial pendukungnya. Sebaliknya, kubu partai yang merasa basis sosialnya tergerus dengan suatu kebijakan akan sebisa mungkin menahan kebijakan tersebut. Alasan inilah artikel ini hadir yang mana bertujuan, seperti yang telah dijelaskan di muka, untuk filling the gap kealpaan para sarjana mengkaji tahap setelah adjusting partai politik terhadap struktur sosial masyarakat yakni upaya penguatan basis sosialnya utamanya melalui kebijakan publik serta bagaimana struktur sosial masyarakat Jombang dan seperti apa penyesuaian diri yang dilakukan partai politik di sana.

Artikel ini akan menambah wawasan kita bahwasanya sistem politik yang lebih kecil di bawah sistem politik negara memiliki keunikan tersendiri sehingga mustahil bagi kita mengadakan generalisasi yang berlebihan. Partai politik boleh bersifat nasional, tetapi saat masuk dalam suatu daerah misalnya Madura atau Jawa, maka partai politik mau tidak mau harus menyesuaikan diri jika menginginkan kekuasaan politik yang langgeng dan menjadi partai politik yang “khas” daerah tempat ia hidup. Selain itu, penelitian ini akan memotret bagaimana komposisi sosial masyarakat Jawa khususnya masyarakat Jawa di Jombang sehingga dapat mengkaji masih relevan tidakkah pembagian masyarakat Jawa dalam literatur dan bagaimana partai politik menyesuaikan diri terhadapnya. Terakhir, artikel ini membawa pandangan baru bagi kita dalam memandang kebijakan publik dari kacamata pertarungan partai politik.

Pada bagian selanjutnya, penulis membahas literature review untuk mengenai konstruksi sosial masyarakat Jawa yang telah ada dalam literature. Hal tersebut penting untuk mengetahui penyesuaian partai politik di Jombang terhadap perbedaan sosial tersebut dan bagaimana strategi yang dikembangkan untuk menguatkan basis sosial-politik masing-masing partai. Setelah itu, penulis mempresentasikan metode yang digunakan. Lalu bagian akhir dari artikel ini membahas temuan dan diskusi.

9 Literature Review

Terdapat beberapa studi terkemuka mengenai partai politik khususnya di Jawa. Pertama Daniel S. Lev (2000:54) menyatakan bahwa partai politik mengikuti *lines of social-religious distinction*. *Social-religious distinction* yang dimaksud adalah dikotomi masyarakat muslim utamanya di Jawa yang terdiri dari masyarakat muslim *syncretic-animist-budist and Islam influence* yang disebut abangan dan masyarakat muslim taat yang dikenal dengan santri. Partai nasionalis berdiri sebagai cerminan dari masyarakat abangan sedangkan partai agamis (Islam) berdiri untuk menarik simpati masyarakat muslim santri. Perbedaan santri-abangan dalam masyarakat ini dipolitisasi menjadi basis dukungan (basis sosial-politik) oleh partai politik (Lupu dan Riedl, 2012:1341).

Penelitian mengenai pembagian santri-abangan dan hubungannya dengan ranah politik juga dilakukan oleh Endang Turmudi di Kabupaten Jombang. Endang Turmudi (2003:178) mengemukakan bahwa di Jombang terdapat kantong-kantong kecamatan basis masyarakat abangan yang disebut dengan kecamatan merah dan kecamatan basis masyarakat santri. Di kecamatan merah partai Islam relatif mendulang suara yang sangat sedikit, sebaliknya partai nasionalis juga mendapat suara yang rendah di kecamatan hijau. Penelitiannya menunjukkan hubungan antara dikotomi santri-abangan dengan konstalasi partai politik di Jombang.

Lebih lanjut mengenai dikotomi santri-abangan dalam masyarakat Jawa, pembagian ini pertama kali diajukan oleh Clifford Geertz, seorang antropolog kenamaan Amerika. Melakukan penelitian di Kota Pare, Jawa Timur Geertz (Geertz, 2014:27) menemukan bahwa Islam di Jawa berbeda dengan Islam di daerah lain. Terjadi sinkretisme agama Islam dimana terdapat masyarakat santri yang menjalankan ke-Islamannya dengan baik namun demikian menurut Geertz telah banyak menyimpang dengan ajaran aslinya dimana telah dilakukan “islamisasi” ajaran-ajaran Hindu seperti tahlilan dan upacara-upacara lainnya seperti upacara pernikahan atau kelahiran. Di sisi lain, terdapat masyarakat abangan yang masih dipengaruhi dengan kuat perilaku animistic dan dinamistik dengan sedikit pengaruh ajaran Islam. Lahirnya masyarakat santri dan abangan merupakan dampak Islamisasi Jawa yang tidak merata dimana terdapat daerah yang dekat dengan pusat pengajaran Islam yakni pondok pesantren sehingga lahirlah masyarakat santri dan daerah yang jauh dari pusat pengajaran Islam sehingga lahirlah masyarakat Abangan (Nurhasim, 2016:69).

Namun demikian, Clifford Geertz telah banyak dipengaruhi oleh pandangan Islam modernis (Bachtiar 581:2014 dalam Geertz, 2014). Dalam hemat penulis hal tersebut telah mengaburkan pandangan Geertz terhadap perbedaan yang mencolok antara Islam tradisional atau konservatif dengan Islam modernis atau puritan. Varian masyarakat santri sebenarnya lebih cocok disematkan pada masyarakat Islam konservatif. Masyarakat santri merupakan masyarakat muslim konservatif yang pandangan keIslamannya mengakar pada pandangan AhlulSunnah wal jamaah yang percaya berpegang pada empat imam besar dalam Islam yakni Syafii, Hambali, Maliki, Maliki dalam menjalankan syariat Islam. Secara kebahasaan santri juga merupakan sebutan bagi murid kyai di pondok pesantren yang notabene merupakan pendidikan keagamaan Islam khas kaum tradisional atau konservatif yang mengikuti ajaran AhlulSunnah wal jamaah (Mastuhu, 1994:58). Sebaliknya, masyarakat Islam modernis kurang tepat jika disebut masyarakat santri sebab pandangan keagamaannya berbeda. Masyarakat Islam modernis menyerukan pembaruan dalam Islam dan kembali pada Al-Qur’an dan Hadist tanpa harus mengikuti empat Imam yang dipercaya kalangan AhlulSunnah wal jamaah (ijtihad secara mandiri) (Ida, 1996:2).

Jika dilihat dari segi kesejarahan, masyarakat Islam konservatif lebih dulu hadir dalam masyarakat Islam Jawa pada khususnya dengan kehadiran pondok pesantren. Namun pada awal era 1900-an kalangan Islam modernis mulai menggaungkan gerakannya lewat didirikannya Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Hal ini mendapat perlawanan dari kaum Islam tradisional dengan mendirikan Nahdlatul Ulama di Surabaya pada 1925 untuk menjaga nilai-nilai AhlulSunnah wal jamaah dari gempuran kaum modernis (Ida: 1996:6). Di ranah politik, melihat konstruksi sosial-keagamaan ini lahirlah partai politik yang berplatform Islam modernis seperti PAN dan PKS atau Masyumi di masa lalu dan partai Islam konservatif seperti PKB, PPP atau Partai NU di masa lalu. Bergabung dengan partai nasionalis-sekuler, partai Islam konservatif, dan partai Islam modernis hingga saat ini selalu mewarnai dinamika politik baik nasional maupun secara khusus di Jawa.

METODE

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, artikel ini bertujuan untuk menguak bagaimana partai politik di Jombang mengikuti alur perbedaan sosial masyarakat Jombang untuk mendapatkan kekuasaan politik, lalu bagaimana partai politik di Jombang mempertahankan dan menguatkan basis sosial-politiknya masing-masing untuk tetap mendapatkan keuntungan dan

kekuasaan politik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini dilakukan melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.

Data utama dalam penelitian ini didapat melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan. Sebelum melaksanakan wawancara, dengan menggunakan penentuan informan secara purposif ditentukan beberapa informan dengan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan diantaranya, terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengesahan Perda, memiliki pengetahuan mendalam mengenai struktur sosial masyarakat Jombang, sert mengetahui seluk-beluk pendidikan pesantren. Dari kriteria ini, ditetapkanlah beberapa informan dari kalangan DPRD seperti Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Ketua Komisi beserta anggota, tokoh-tokoh kyai, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, sejarawan, hingga masyarakat Jombang secara umum. Wawancara dilakukan di Kabupaten Jombang dari kurun waktu Maret hingga Juni 2017.

Sebagai pelengkap wawancara mendalam, pengumpulan data sekunder melalui literature review dokumen pemerintah, buku, jurnal, skripsi, hingga artikel-artikel di internet. Untuk mempertajam data observasi lapangan juga dilakukan dimana penulis tinggal di daerah sekitar Jombang dan turut mengamati perilaku masyarakat khususnya informan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder tersebut meliputi: a) struktur sosial masyarakat Jombang, b) penyesuaian partai politik terhadap struktur sosial tersebut, c) peta sosial-politik (basis dukungan) partai politik di Jombang, serta d) strategi yang dilakukan partai politik di Jombang untuk menguatkan dan mempertahankan basis sosial-politik yang dimiliki melalui kebijakan publik (Perda Penyelenggaraan Pendidikan).

Konstruksi Sosial Masyarakat Jombang

Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh informan baik dari kubu partai nasionalis dan partai Islam-modernis yang menolak masuknya pondok pesantren dalam Perda serta partai Islam-konservatif yang berupaya memasukkan pondok pesantren dalam Perda, serta tokoh kyai dan sejarawan, ditemukan hal menarik bahwa mereka semua mengidentifikasi masyarakat Jombang pembagian yang sama yakni santri dan abangan. Terdapat kecamatan yang diidentifikasi sebagai basis kecamatan abangan seperti Kecamatan Kabuh, Ploso, Kudu, Ngusikan, Bareng, dan Wonosalam. Kecamatan tersebut merupakan kecamatan di daerah pinggiran kabupaten Jombang, identik dengan petani “wong cilik” yang berpenghasilan rendah.

Terdapat beberapa alasan mengapa kecamatan tersebut diidentifikasi sebagai kecamatan abangan. Alasan pertama, pada kecamatan-kecamatan tersebut sedikit sekali berdiri pesantren. Berdasarkan data pesantren dari kementerian agama, di beberapa kecamatan abangan bahkan tidak dijumpai pondok pesantren yang berdiri seperti Wonosalam, Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu, Megaluh, dan Ngusikan. Ketidakhadiran pesantren di beberapa kecamatan tersebut dianggap menjadi alasan mengapa karakter masyarakatnya menjadi karakter masyarakat abangan sebab masyarakat tidak mempunyai “fasilitas” pendukung dalam mempelajari agama dengan baik dengan jarak kondisi daerah yang jauh dari pusan pengajaran agama Islam pesantren.

Alasan kedua, bahwasanya kecamatan seperti Wonosalam, Bareng, dan Kabuh merupakan daerah pelarian mantan anggota dan simpatisan PKI di masa lalu mengingat kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai wilayah hutan. Keberadaan “mantan” PKI di daerah tersebut dianggap menjadi alasan mengapa daerah tersebut merupakan daerah abangan. Dari keterangan yang didapat dari beberapa pimpinan partai Islam jejak mantan PKI di daerah tersebut masih dapat ditelusuri yang mana hingga saat ini mereka sangat membenci partai politik

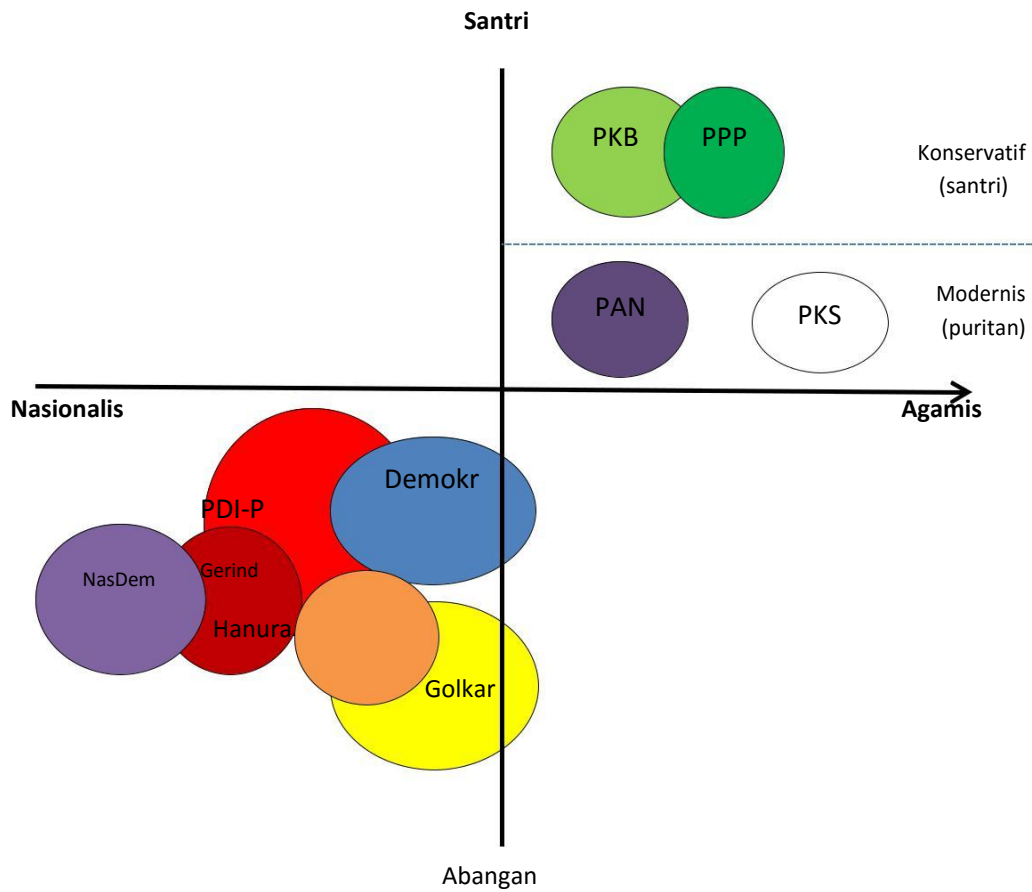
Islam mengingat dahulu pembantaian PKI di Jombang banyak dilakukan orang Masyumi dan NU.

Setelah mengetahui peta abangan dan santri di Kabupaten Jombang, hal yang menarik adalah bagaimana dengan masyarakat santri Nahdlatul Ulama atau sering disebut Nahdliyin yang sering dikaitkan dengan Jombang. Nahdlatul Ulama sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang mana seringkali dikaitkan dengan Jombang. Hal tersebut wajar karena Hasyim Ashari pendiri NU merupakan Kyai yang berasal dari Jombang. Setelah Hasyim Ashari muncul pula pentolan-pentolan NU Jombang yang dikenal publik nasional seperti Gus Dur, Kyai Mustain, Wahab Hasbullah dan tokoh-tokoh NU lainnya yang berasal dari Jombang. Namun demikian meskipun Jombang yang lekat dengan NU tidak serta-merta partai Islam seperti PKB atau PPP bisa langgeng di kursi kekuasaan. Nyatanya partai nasionalis selalu menjadi pemenang pemilu baik di ranah eksekutif maupun ranah legislatif. Hal tersebut karena warga nahdliyin di Jombang memiliki keunikan tersendiri.

Pertama kita harus melihat bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya masyarakat muslim Jombang dari segi kesalehan agamanya dapat dibagi ke dalam masyarakat Abangan dan Masyarakat Santri. Dikotomi abangan-santri ini ternyata menembus dinding organisasi NU. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di daerah abangan yang telah dijelaskan di muka Masyarakat Abangan di Jombang juga mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Nahdliyin meskipun secara kultural mereka memegang budaya masyarakat abangan.

Adjusting Partai Politik

Konstruksi sosial masyarakat Jombang yang terbagi dalam trikotomi abangan-santri-puritan membuat partai politik di Jombang ikut menyesuaikan diri terhadap konstruksi atau perbedaan sosial yang ada tersebut. Partai nasionalis sekuler seperti PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan Hanura dengan platform ideologi nasionalis yang dibawa secara “alamiah” menjadikan masyarakat abangan di Jombang sebagai basis sosial-politiknya. Dari masyarakat abangan ini, partai nasionalis mendapat dukungan politik yang besar di Jombang. Sebaliknya, keberadaan masyarakat santri tradisional yang berada di Jombang dengan ditandai berdirinya beberapa pesantren besar dimanfaatkan oleh partai Islam konservatif seperti PKB dan PPP sebagai basis pendukung. Pun demikian Partai Islam modernis seperti PAN dan PKS mencaplok masyarakat puritan di Jombang meskipun jumlahnya tidak terlalu besar menjadi basis pendukung partai tersebut.



Gambar 1. Persinggungan trikotomi partai politik santri-puritan-abangan dengan basis ideologi Sumber: Dimodifikasi bagan yang dibuat Moch. Nurhasim, Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 19.

Menjaga Basis Sosial-Politik Lewat Perda

Partai politik di Jombang yang telah melakukan adjusting dengan konstruksi sosial masyarakat Jombang yang terdiri dari santri, puritan, dan abangan senantiasa mengadakan usaha-usaha untuk menguatkan basis sosial masing-masing. Partai abangan selalu berusaha untuk menguatkan masyarakat abangan, partai santri menguatkan basis masyarakat santri, demikian pula partai puritan berusaha untuk menguatkan basis sosialnya yakni masyarakat puritan.

Nampaknya di Jombang partai Abangan-nasionalis telah lama mendominasi pemerintahan baik di ranah eksekutif maupun ranah legislatif. Bahkan sejak pemilu-pemilu era Orde Baru telah terjadi peningkatan suara partai nasionalis utamanya PDI dan turunnnya suara partai Islam saat itu. Bahkan meskipun rezim Suharto telah jatuh dan pemerintah dapat menghadirkan Pemilu yang jujur dan adil di Jombang, partai nasionalis tetap mendominasi.

PilegTahun	Pemenang	Jumlah Kursi
1999	PDI-P	16 kursi
2004	PKB	15 kursi
2009	PDI-P	12 kursi
2014	PDI-P	9 kursi

Tabel 1. Pemenang Pemilu Legislatif Kabupaten Jombang dari 1999-2014 (sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber)

Dominasi partai nasionalis juga dapat dilihat dari cabang eksekutif. Pada periode 1998-2003 Bupati Jombang dipegang oleh Affandi yang merupakan politisi PDI-P. Lalu dua periode lamanya yakni periode 2003-2008 dan 2008-2013, kembali kursi bupati dipegang oleh PDI-P dengan wakilnya Suyanto. Pun demikian di ranah legislatif dapat dilihat pemenang pemilu selalu berasal dari partai abangan-nasionalis. Dominasi partai abangan-nasionalis ini juga dikonfirmasi oleh informasi dari para petinggi PKB dan PPP di Jombang yang mengeluhkan banyak kecamatan abangan yang tidak sevisi dengan partai Islam.

Masa Jabatan	Bupati	Asal Parpol
1998-2003	Drs. H. Affandi, M.Si	PDI-P
2003-2008	Drs. H. Suyanto	PDI-P
UU No. 32 Tahun 2004 (kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat)		
2008-2013	Drs. H. Suyanto	PDI-P
2013-2019	Dr. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko	Golkar

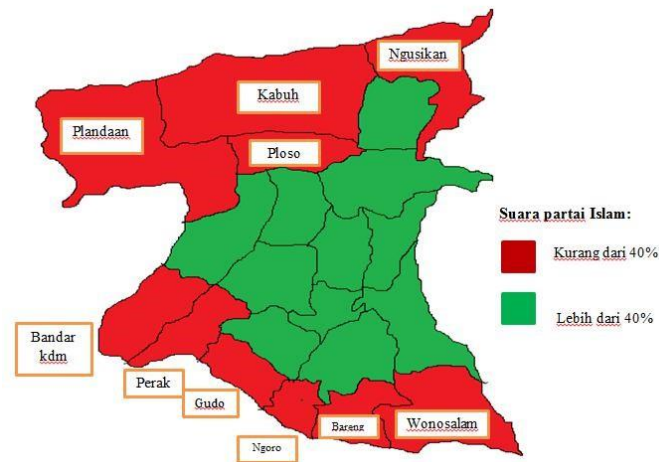
Tabel 2. Daftar Bupati Jombang beserta asal parpol 1998-2019 (sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber)

Melihat dominasi partai abangan-nasionalis ini, partai santri mencoba untuk mengusiknya. Dengan memasukkan pondok pesantren ini partai santri berharap untuk bisa mendobrak dominasi partai abangan-nasionalis di Kabupaten Jombang. Memasukkan pondok pesantren dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan artinya “menguatkan” pondok pesantren yang secara kultural dekat dengan partai santri dan dengan itu berharap bahwa partai santri juga turut menguat.

Salah satu alasan mengapa partai abangan-nasionalis begitu kuat adalah besarnya masyarakat abangan atau NU-abangan dalam masyarakat Jombang. berbeda dengan masyarakat santri, komposisi masyarakat abangan terdiri dari masyarakat yang kesalehan Islamnya masih belum mumpuni sebab jauh dari pusat pengajaran agama seperti pondok pesantren dan di Jombang sendiri daerah-daerah seperti Wonosalam dan Barend memang dikenal luas sebagai tempat pelarian PKI di masa lalu sehingga basis Abangan menjadi sangat kuat. Karakter masyarakat semacam ini membuat mereka lebih nyaman dengan partai abangan-nasionalis daripada partai santri.

Dari informasi yang disampaikan Ketua DPRD Jombang diungkapkan bahwa ada beberapa kecamatan yang tidak bisa menerima Perda yang terlalu Islami. Hal itu disebabkan kebudayaan kecamatan yang disebutkan memiliki budaya abangan yang kental sehingga Perda Penyelenggaraan Pendidikan dengan pengintegrasian pesantren di dalamnya tidak bisa dilakukan. Kita dapat mengetahui pula dari pernyataan di atas bahwa masyarakat abangan lebih bisa “bersatu” dan mengartikulasikan kepentingan mereka kepada partai abangan-nasionalis daripada partai agamis.

Sejak era pemilu 1955, pemilu-pemilu Orde Baru, hingga pemilu saat ini peta masyarakat abangan memang terbilang ajeg atau stabil. Peta masyarakat Abangan di Jombang untuk era Orde Baru pernah dibuat oleh Endang Turmudi dengan hasil yang memperlihatkan bahwa daerah pinggiran Jombang merupakan daerah basis abangan yang selaras dengan minim atau bahkan tidak adanya pesantren serta perolehan suara partai Islam yang sangat kecil. Penulis akhirnya juga membuat pemetaan masyarakat abangan dilihat dari perolehan hasil suara partai Islam berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu 2014 yang hasilnya sebagai berikut.



Gambar 2. Pemetaan basis masyarakat abangan di Jombang berdasarkan perolehan suara Pemilu 2014 (sumber: diolah oleh penulis dari data KPU di https://pemilu2014.kpu.go.id/da1_dprd2.php)

Di kantong-kantong abangan seperti Wonosalam, Bares, Plandaan, dan Ploso serta kecamatan yang lainnya di atas suara partai Islam yakni PKB, PPP, PAN, dan PKS jika diakumulasi memperoleh kurang dari 40% kalah jauh dengan perolehan suara partai nasionalis seperti PDI-P, Golkar atau Demokrat. Peta basis masyarakat abangan di Jombang berdasarkan hasil Pemilu 2014 yang penulis buat selaras dengan pemaparan informasi informan jika daerah pinggiran Jombang memang merupakan basis abangan yang mayoritas petanidan jauh dari pusat pengajaran agama Islam pondok pesantren.

Melihat dari komposisi masyarakat abangan yang kuat ini maka wajar jika partai abangan-nasionalis selalu keluar menjadi pemenang pemilu dan cukup mendominasi pemerintahan Jombang baik eksekutif maupun legislatif. Oleh sebab itu upaya-upaya melahirkan Perda yang terlalu berbau Islam atau menguatkan basis suara NU-santri seperti pengintegrasian pesantren dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan selalu menemui “penolakan” dari partai abangan sebab mereka tidak ingin basis masyarakat abangan tergerus dengan upaya penguatan masyarakat santri.

Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Junaidi yang merupakan tokoh kyai dan mantan anggota legislatif, PDI berkepentingan menjaga masyarakat yang minus agama (masyarakat abangan) agar tidak bergerak menjadi masyarakat santri dengan adanya “kebijakan pesantren”. Masyarakat abangan inilah yang Junaidi bilang memiliki visi yang berbeda dengan partai santri karena kultur mereka berbeda dengan kultur santri yang diusung oleh partai santri (PKB dan PPP).

Partai santri dipandang harus mulai melakukan pendekatan kultural untuk menghentikan dominasi partai abangan-nasionalis seperti menguatkan pondok pesantren lewat Perda. Partai abangan-nasionalis selalu menang sebab daerah abangan begitu besar di Jombang mulai dari Plandaan di ujung utara menyisir daerah pinggir hingga daerah Wonosalam. Oleh karenanya untuk “merusak” basis dukungan abangan-nasionalis ini yakni masyarakat abangan maka kultur mereka secara perlahan-lahan harus dihapus dan digerakkan menjadi kultur santri. Langkah konkritnya, partai santri yang berada di pemerintahan dan memegang otoritas harus bisa membangun pondok pesantren di kantong abangan seperti Wonosalam yang penduduknya cukup

besar atau Plandaan dan kantong-kantong abangan lainnya. Upaya menguatkan pondok pesantren melalui Perda Penyelenggaraan Pendidikan dianggap merupakan suatu strategi untuk menguatkan basis masyarakat santri dan membongkar masyarakat abangan yang menjadi basis sosial partai abangan-nasionalis.

KESIMPULAN

Proposisi bahwa partai politik mengikuti perbedaan sosial dalam masyarakat terkonfirmasi dalam artikel ini. Partai politik di Jombang mengikuti alur perbedaan sosial masyarakat Jombang yang terbagi dalam trikotomi santri, puritan, dan abangan. Masyarakat santri adalah masyarakat Islam konservatif, masyarakat puritan merupakan masyarakat muslim modernis atau puritan, sedangkan masyarakat abangan adalah masyarakat yang beragama Islam namun masih banyak dipengaruhi kebiasaan-kebiasaan animistik dan dinamistik. Partai nasionalis menjadikan mempolitisasi basis masyarakat abangan menjadi basis dukungan mereka, partai Islam konservatif menjadikan masyarakat santri sebagai basis dukungan politik, sedangkan partai puritan menjadikan basis puritan di Jombang sebagai basis dukungan politik.

Temuan bahwa masyarakat Jombang terbelah dalam trikotomi santri-puritan-abangan menjadi koreksi terhadap pembagian masyarakat muslim Jawa dalam dikotomi santri dan abangan oleh Clifford Geertz. Geertz nampaknya telah gagal melihat masyarakat santri secara lebih dalam bahwa terdapat perbedaan yang mencolok tentang pandangan keagamaan umat Islam konservatif dan umat Islam modernis di mana di ranah politik dan sosial sering sekali terjadi gesekan antara kedua kelompok tersebut.

Dalam memperkuat dan menjaga basis sosialnya, partai politik di Jombang menggunakan Perda sebagai alat. Partai santri mencoba untuk menguatkan pendidikan khas santri yakni pondok pesantren untuk menguatkan basis masyarakat santri di Jombang. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk memutus dominasi partai abangan yang telah lama menguasai pemerintahan di Jombang. Partai abangan dan partai puritan di lain pihak menahan pengesahan Perda tersebut untuk mencegah menguatnya basis santri yang akan mengancam basis sosial-politik mereka.

Studi ini dalam literatur partai politik di Indonesia menambah wawasan kita bahwasanya partai politik dalam usaha mendapatkan dukungan politik tidak berhenti pada tahap menyesuaikan diri dengan alur perbedaan sosial dalam masyarakat. Lebih dari itu, partai politik mengembangkan strategi-strategi untuk menguatkan basis sosial-politiknya salah satunya melalui kebijakan publik. Partai politik senantiasa menelurkan kebijakan yang condong menguatkan basis sosial-politiknya dan menahan kebijakan yang cenderung menggerus basis sosial-politiknya sehingga kebijakan publik hanya menjadi arena pertarungan politik antar partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, I. (1996). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Bulkin, F. (1995). *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia: Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Geertz, C. (2014). *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.

Ida, L. (1996). *Anatomi Konflik: NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

M. Dawam Raharjo, Abdurrahman Wahid, Suyoto, M. Habib Chirzin, Nurcholish Madjid, M Saleh Widodo, Ali Saifullah H A, Edwar. (1985). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.

Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).